

## Heru Budi Kalungkan Syal Usai Pemrov DKI Raih Opini WTP 6 Kali Beruntun

JAKARTA (IM) - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengkalungkan syal berwarna biru muda bertuliskan "6 WTP Sukses Jakarta untuk Indonesia" ke lehernya.

Heru Budi mengenakan syal setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun anggaran 2022. Raihan WTP itu diumumkan anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit dalam rapat paripurna legislatif Jakarta yang digelar Senin (29/5).

"Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2022," ujar Ahmadi saat rapat.

Tak lama setelah itu, Heru yang duduk di bangku sisi kanan depan ruang rapat paripurna langsung mengenakan syal yang telah di-

siapkan sebelumnya. Setelah sekitar 10 menit kemudian, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Masudi turut mengenakan syal yang sama. Prasetyo mengikat syal tersebut di kepalanya.

Selain Heru dan Prasetyo, sejumlah aparat sipil negara (ASN) juga menyambut meriah keputusan BPK RI yang memberikan opini WTP atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2022.

Pengamatan di lokasi, sejumlah ASN membentangkan spanduk setelah rapat paripurna selesai. Dua spanduk berukuran sekitar 3x2,5 meter dengan dominan warna biru itu dibentangkan oleh para ASN di dinding lantai dua ruang paripurna.

"Yes, we did it. WTP Again," demikian kalimat yang tertulis di spanduk. "Matahari belum terbenam. Saatnya kita bercocok tanam jelang usia 496 Jakarta," demikian kalimat yang tertera pada spanduk lain. Selain membentangkan spanduk, para ASN juga berteriak menyambut raihan Pemrov DKI. "Hooo... Hooo," teriak para ASN bersorak.

● yan

## Anggota DPRD DKI Bantah Berpihak pada Pemilik Ruko Pluit

JAKARTA (IM) - Anggota DPRD DKI Jakarta, Gani Suwondo membantah telah memberikan pertolongan kepada para pemilik ruko yang menyerobot lahan fasilitas umum (fasum) di Pluit, Jakarta Utara.

"Tidak, saya dengan pemilik ruko itu tidak kenal. Saya tidak ada yang kenal sama siapapun di ruko itu," kata dia saat dihubungi, Senin (29/5).

Kabar terkait kedekatan antara Gani dan pemilik ruko mencuat setelah ia mendatangi para pemilik ruko yang bangunannya dibongkar Pemrov DKI Jakarta. Gani mengakui ia menemui para pemilik ruko, namun itu dilakukan untuk mendengarkan aspirasi mereka.

Ia mengaku kecewa karena menurutnya ada UMKM yang kehilangan tempat berdagang. "Saya setuju pembongkaran, tapi mereka yang UMKM mau ke mana?" ucapnya.

Dia berharap, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta mau menyec-

diakan tempat yang layak bagi para pelaku UMKM tersebut.

Di sisi lain, Ketua RT 011/03 Pluit Riag Prasetya mengatakan siapapun pihak yang melanggar aturan memang semestinya ditindak tegas, baik itu pengusaha besar maupun UMKM. "Jangan membawa nama UMKM dengan adanya pelanggaran-pelanggaran. Bagaimana mungkin UMKM berdagang di atas saluran air, bahkan berdagang di bahu jalan," ujar Riag.

Ia menegaskan, bahwa hal itu tidak ada urusannya dengan UMKM, tetapi lebih ke persoalan pelanggaran aturan. Riag juga mengaku tidak terima dengan adanya kunjungan sejumlah pejabat, termasuk Gani, yang menurutnya berpihak pada pemilik ruko yang secara nyata adalah pelaku pelanggaran.

"Saya sesalkan karena kemarin (25/5) ada sekelompok orang yang datang mengatasnamakan satu organisasi dan saya lihat di situ ada anggota DPRD yang hadir, dari DPRD DKI, dan juga dari DPR RI," tuturnya. ● yan

# 4 | Metropolis

FOTO/ANTARA



TRIAL RUN LRT JABODEBEK

Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) melintas di jalur LRT kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (29/5). LRT Jabodebek tengah diuji coba tanpa penumpang atau trial run selama 15 Mei hingga 11 Juli 2023, sebelum diuji coba beroperasi dengan penumpang pada 12 Juli 2023.

## BPK Temukan Rp197 Miliar Anggaran DKI Tak Disalurkan ke Pemegang KJP Plus

Bantuan Sosial KJP Plus dan KJMU senilai Rp197,55 miliar belum disalurkan kepada penerimanya dan Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar senilai Rp15,18 miliar tidak sesuai ketentuan, kata Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit saat menyampaikan hasil pemeriksaan BPK atas anggaran tahun 2022 di Gedung DPRD DKI, Senin.

JAKARTA (IM) - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI mengungkap temuan sebesar Rp197,55 miliar anggaran tahun 2022 di Provinsi DKI Jakarta yang tidak tersal-

urkan kepada pemegang KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan (KJMU).

"Bantuan Sosial KJP Plus dan KJMU senilai Rp197,55 miliar belum disalurkan kepada penerimanya dan Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar senilai Rp15,18 miliar tidak sesuai ketentuan," kata Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit saat menyampaikan hasil pemeriksaan BPK atas anggaran tahun 2022 di Gedung DPRD DKI, Senin (29/5).

Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Ja-

karta juga kedatangan melakukan pembayaran atas belanja senilai Rp 11,34 miliar lantaran ada kelebihan penghitungan gaji dan tambahan penghasilan senilai Rp6,38 miliar.

"Kekurangan volume pengadaan barang atau jasa sebesar Rp4,06 miliar, kelebihan pembayaran belanja hibah dan bansos senilai Rp878 juta," katanya.

Sedangkan denda keterlambatan senilai Rp34,53 miliar. "Atas permasalahan tersebut telah dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp14,66 miliar," kata Supit.

Walaupun demikian, temuan tersebut tidak mempengaruhi opini BPK dalam memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemprov DKI Jakarta.

BPK meminta Pemprov DKI melanjutkan temuan tersebut terhitung selama 60 hari setelah laporan tersebut diberikan.

Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyatakan akan menindaklanjuti semua temuan BPK. "Akan ditindaklanjuti," kata dia singkat saat ditemui wartawan. ● yan

## AP II Usul TransJakarta Bisa Masuk ke Bandara Soetta

JAKARTA (IM) - PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II mengusulkan bus TransJakarta dapat melayani rute dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Yakin, pada jam tertentu, pagi hari dan sore hari untuk melayani mobilitas karyawan.

Direktur Utama (Dirut) AP II, Muhammad Awaluddin mengatakan jumlah pekerja di Bandara Soetta mencapai berkisar 40 ribu-50 ribu orang. Mereka bekerja di berbagai instansi seperti

AP II, maskapai, ground handling, instansi pemerintahan, tenant komersial, dan sebagainya.

"Setiap harinya para pekerja ini bermobilitas dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta. Apabila ada bus TransJakarta maka dapat memberikan lebih banyak pilihan moda transportasi bagi pekerja bandara," kata Awaluddin melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (29/5).

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi

Karya Sumadi menggelar rapat koordinasi dengan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Dirut AP II membahas integrasi moda transportasi di Bandara Soetta, pada Minggu (28/5).

Rapat koordinasi digelar di kereta inspeksi dalam perjalanan dari Bandara Soetta ke Stasiun BNI City, Jakarta. Dalam rapat itu, kata dia, AP II mengusulkan bus TransJakarta dapat beroperasi di Bandara Soetta di jam tertentu.

Misalnya di pagi hari pada

pukul 06.00-09.00 WIB dan sore hari pada pukul 18.00-21.00 WIB sebagai moda transportasi untuk berangkat dan pulang kerja bagi pekerja di bandara.

Lebih lanjut, Awaluddin menyampaikan halte bus TransJakarta nantinya juga bisa disiapkan di lokasi khusus di kawasan Bandara Soetta atau bukan di terminal penumpang.

"Bus TransJakarta itu nantinya bisa diintegrasikan dengan transportasi publik

yang khusus untuk di dalam kawasan Bandara Soekarno-Hatta seperti shuttle bus dan skytrain untuk mempermudah pekerja di bandara," ujarnya.

Sementara, Menhub mengatakan kapasitas transportasi publik dari dan ke Bandara Soetta akan ditingkatkan dan tarif juga akan diupayakan lebih terjangkau dari saat ini.

"Kami diskusikan bagaimana upaya meningkatkan kapasitas (transportasi publik dari dan ke Bandara Soetta), bagaimana melakukan jangkauan yang lebih luas, dan bagaimana tarif itu bisa lebih terjangkau bagi masyarakat," kata Menhub.

Sedangkan, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan dalam rapat itu memang ada usulan dari AP II agar bus TransJakarta bisa beroperasi di Bandara Soetta. "Tadi ada diskusi di meja rapat, ada usulan dari Direktur Utama Angkasa Pura II, bagaimana kalau bus TransJakarta masuk (ke Bandara Soetta) tapi di jam-jam tertentu untuk memudahkan para karyawan (di Bandara)," ujar Heru. ● yan

PT ASURANSI JIWA STARINVESTAMA (d/h PT ASURANSI JIWA RECAPITAL)				MARI Berasuransi												
Rukan Graha Cempaka Mas Blok E No. 1 Jl Letjend Suprpto, Jakarta Pusat				LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2022 dan 2021												
LAPORAN POSISI KEUANGAN (dalam jutaan rupiah)				LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF (dalam jutaan rupiah)				INDIKATOR KESEHATAN KEUANGAN (dalam jutaan rupiah)								
ASET		2022	2021	LIABILITAS DAN EKUITAS		2022	2021	URAIAN		2022	2021	PEMENUHAN TINGKAT SOLVABILITAS		2022	2021	
<b>I. INVESTASI</b>				<b>I. UTANG</b>				<b>1 PENDAPATAN</b>				<b>A. Tingkat Solvabilitas</b>				
1	Deposito Berjangka	583.271	178.250	1	Utang Klaim	25.158	23.441	1	Pendapatan Premi	3.890.040	2.636.840	a. Aset Yang Diperkeranakan	279.937	246.798		
2	Sertifikat Deposito	-	-	2	Utang Koasuransi	-	-	2	Premi Reasuransi	(853)	(278)	b. Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)	67.858	64.027		
3	Saham	1.020.414	777.238	3	Utang Reasuransi	265	123	3	Penunuran (Kenaikan) CAPYBMP	(1.207)	(55)	c. Jumlah Tingkat Solvabilitas	212.078	182.771		
4	Obligasi Korporasi	2.503.874	1.368.636	4	Utang Komisaris	1.154	2.635	4	Jumlah Pendapatan Premi Neto	3.887.980	2.636.508	<b>B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)</b>				
5	MTN	549.760	527.532	5	Utang Pajak	407	395	5	Hasil Investasi	339.168	172.533	a. Risiko Kredit	-	-		
6	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	81.231	88.217	6	Biaya yang Masih Harus Dibayar	1.999	3.642	6	Imbalan Jasa DPLK / Jasa Manajemen Lainnya	-	-	b. Risiko Likuiditas	3.165	2.735		
7	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	-	-	7	Utang Lain	63.934	13.735	7	Pendapatan Lain	76.934	63.149	c. Risiko Pasar	310	307		
8	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	8	Jumlah Utang (1 s/d 7)	92.917	43.970	8	Jumlah Pendapatan	4.304.082	2.872.190	d. Risiko Asuransi	1.487	1.884		
9	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	<b>II. CADANGAN TEKNIS</b>				9	<b>BEBAN</b>	-	-	e. Risiko Operasional	4.961	3.490		
10	Reksa Dana	29.937	69.488	9	Cadangan Premi	4.613.219	3.225.210	10	<b>Klaim dan Manfaat</b>	-	-	f. Jumlah MMBR	26.113	23.349		
11	Efektif Beragang Aset	-	-	10	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	1.479	269	a. Klaim dan Manfaat Dibayar	2.928	2.463	g. Kelebihan (Kekurangan) Tingkat Solvabilitas	185.966	159.422			
12	Dana Investasi Real Estat	-	-	11	Cadangan Risiko	10.834	13.394	b. Klaim Penunuran	2.806.867	1.677.989	d. Rasio Pencapaian (%)*	812,17%	782,78%			
13	REPO	-	-	12	Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)	37	16	c. Klaim Reasuransi	(171)	(110)	<b>RASIO SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS</b>					
14	Penyerahan Langsung	-	-	13	Jumlah Cadangan Teknis (9 s/d 12)	4.625.569	3.238.889	d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi	(1.005)	(1.385)	a. Rasio Kecukupan Investasi (%)	450,92%	443,85%			
15	Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi	-	-	14	Jumlah Liabilitas (8 + 13)	4.718.486	3.282.858	e. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	(2.726)	(1.393)	b. Rasio Likuiditas (%)	474,30%	369,28%			
16	Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing)	30.000	30.000	15	Pinjaman Subordinasi	-	-	f. Kenaikan (Penurunan) Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)	21	(1)	c. Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Neto (%)	287,67%	1801,31%			
17	Emas Murni	-	-	16	Pinjaman Subordinasi	-	-	12	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat	2.805.914	1.677.563	d. Rasio Beban (Klaim, Usaha, dan Komisaris) terhadap Pendapatan Premi Neto (%)	164,13%	3673,21%		
18	Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	-	-	<b>III. EKUITAS</b>				13	Biaya Akuisisi	26.814	20.939	<b>Keterangan:</b>				
19	Pinjaman Polis	-	-	15	Modal Disetor	300.000	300.000	a. Beban Komisaris	1.537	1.089	*) Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, rasio pencapaian tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya adalah 100% dengan target internal paling rendah 120% dari MMBR	*) Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, rasio pencapaian tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya adalah 100% dengan target internal paling rendah 120% dari MMBR				
20	Investasi Lain	-	-	16	Modal Disetor	300.000	300.000	b. Beban Lainnya	28.351	22.027	<b>Catatan:</b>					
21	Jumlah Investasi (1 s/d 20)	4.798.488	3.039.361	17	Agio Saham	-	-	14	Jumlah Biaya Akuisisi	28.351	22.027	a. Diaudit oleh Akuntan Publik "Kanaka Puradiredja, Suhartono" untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" dan oleh Akuntan Publik "Anwar & Rekan" dengan opini Tanpa Modifikasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021	a. Diaudit oleh Akuntan Publik "Kanaka Puradiredja, Suhartono" untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" dan oleh Akuntan Publik "Anwar & Rekan" dengan opini Tanpa Modifikasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021			
22	Kas dan Bank	52.916	406.221	18	Saldo Laba	(70.025)	(100.706)	15	Jumlah Beban Asuransi	2.834.285	1.699.590	b. Angka (nilai) yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif berdasarkan SAK (Audited)	b. Angka (nilai) yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif berdasarkan SAK (Audited)			
23	Tagihan Premi Penutupan Langsung	509	73	19	Komponen Ekuitas Lainnya	(7.525)	(700)	16	Beban Usaha	349	333	c. Kurs pada tanggal 31 Desember 2022, 1 US \$ : Rp. 15.731	c. Kurs pada tanggal 31 Desember 2022, 1 US \$ : Rp. 15.731			
24	Tagihan Premi Reasuransi	-	-	20	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas (14 + 15 + 20)	4.940.936	3.481.452	a. Beban Pemasaran	36.057	27.513	d. Kurs pada tanggal 31 Desember 2021, 1 US \$ : Rp. 14.269	d. Kurs pada tanggal 31 Desember 2021, 1 US \$ : Rp. 14.269				
25	Aset Reasuransi	742	166	<b>Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi</b>				17	Jumlah Beban Usaha	50.665	29.833	<b>KOMISARIS DAN DIREKSI</b>				
26	Tagihan Klaim Koasuransi	81	98	NO	URAIAN	2022	2021	18	Jumlah Beban	2.884.930	1.729.423	<b>DEWAN KOMISARIS</b>				
27	Tagihan Klaim Reasuransi	81	98	1	Aset	4.539.342	2.794.955	19	Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset	1.388.607	1.107.734	<b>KOMISARIS UTAMA</b> : Endra Raharja Oka Masagung				
28	Tagihan Investasi	40	45	2	Bukan Investasi	111.285	423.876	20	Labu (Rugi) Sebelum Pajak	30.545	35.033	<b>KOMISARIS INDEPENDEN</b> : Ailis Limarto				
29	Tagihan Hasil Investasi	40.875	26.749	3	Jumlah Aset	4.650.628	3.218.831	21	Pajak Penghasilan	(167)	292	<b>KOMISARIS INDEPENDEN</b> : Eko Sulistyanto Edwin Basuki				
30	Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri	-	-	4	Liabilitas	45.420	2.231	22	Labu (Rugi) Setelah Pajak	(6.856)	8.999	<b>KOMISARIS</b> : Agus Herawan				
31	Biaya Akuisisi yang Dikaitkan dengan	-	-	5	Utang	4.605.207	3.216.600	23	Pendapatan Komprehensif Lain	30.712	34.741	<b>DIREKSI</b>				
32	Aset Tetap Lain	45.772	6.727	6	Cadangan Teknis	4.650.628	3.218.831	24	Total Laba (Rugi) Komprehensif	23.857	43.739	<b>DIREKTUR UTAMA</b> : Liarny				
33	Aset Lain	142.448	442.091	<b>REASURADUR UTAMA</b>				<b>DIREKTUR</b> : Iwen Lender								
34	Jumlah Bukan Investasi (22 s/d 33)	4.940.936	3.481.452	<b>NAMA REASURADUR</b>				<b>DIREKTUR</b> : Hery Suranto								
35	Jumlah Aset (21 + 34)	4.940.936	3.481.452	<b>REASURANSI Dalam Negeri</b>				<b>PEMILIK PERUSAHAAN</b>								
								1. PT. Tugu Reasuransi Indonesia				99,99%				
								2. PT. Reasuransi Nasional Indonesia				0,01%				
								3. PT. Reasuransi Nusantara Makmur								

**PENGUMUMAN**  
Guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa salah satu pemegang saham PT. TRIARA AGUNG LESTARI, berkedudukan di Jakarta Selatan, berkedudukan di Jakarta Utara (Perseroan), yaitu PT. SETIA CIPTA DINAMIKA, berkedudukan di Jakarta Selatan akan mengalihkan secara langsung 70% (tujuh puluh persen) saham miliknya dalam Perseroan kepada pihak ketiga.

Para pihak yang berkeberatan terhadap rencana pengalihan saham secara langsung tersebut, dapat mengajukan keberatannya dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, terhitung setelah tanggal pengumuman ini ke kantor Perseroan yaitu di Komplek Wijaya Grand Centre Blok C No.26-27, Jalan Wijaya II, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Jakarta, 30 Mei 2023  
Direksi  
PT. TRIARA AGUNG LESTARI

**PENGUMUMAN**  
Guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa salah satu pemegang saham PT. SETIA CIPTA DEVELOPMENT, berkedudukan di Jakarta Utara (Perseroan), yaitu PT. SETIA CIPTA DINAMIKA, berkedudukan di Jakarta Selatan akan mengalihkan secara langsung 54% (lima puluh empat persen) saham miliknya dalam Perseroan kepada pihak ketiga.

Para pihak yang berkeberatan terhadap rencana pengalihan saham secara langsung tersebut, dapat mengajukan keberatannya dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, terhitung setelah tanggal pengumuman ini ke kantor Perseroan yaitu di Rukan The Fifty Nomor 1, Jalan Arteri Kelapa Gading, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Jakarta, 30 Mei 2023  
Direksi  
PT. SETIA CIPTA DEVELOPMENT